

**KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH DI KOTA BITUNG**

Oleh:
Mercy Pricilia Suoth

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
e-mail: priciliamercy@yahoo.com

ABSTRAK

Diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk mampu mengelola sendiri rumah tangganya baik di bidang pendapatan maupun pengeluaran. Kinerja merupakan suatu proses pencapaian kegiatan dari pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang dipungut dari daerah itu sendiri, yang terdiri dari Pajak dan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Alam yang Dipisahkan dan Lain-lain pendapatan yang sah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja dari pemerintah daerah dalam pengelolaan pendapatan asli daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan dan mengolah data. Hasil penelitian dengan menggunakan rasio efektifitas, pendapatan asli daerah kota Bitung terus mengalami peningkatan, sedangkan hasil penelitian dengan menggunakan rasio efisiensi, anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memungut pendapatan asli daerah masih terlalu besar. Sehingga dapat disimpulkan, kinerja dari Dinas Pendapatan Daerah selama 5 tahun terakhir adalah baik.

Kata kunci: kinerja, pendapatan asli daerah

ABSTRACT

With the Constitution of Regional Autonomy Law requires local governments to be able to manage the own household well in the field of income and expenditure. Performance is a process of achieving the activities of the government in running the government. Local revenue is revenue collected from the region itself, which consists of Local Taxes, Levies, Natural Wealth Management Results and Other Separated legitimate income. Purpose this study was to determine the performance of the government in the management of local revenue. This reaserch is used the descriptif kualitative method by collecting and processing the data. Based on the results of the study by using the ratio of effectiveness, Bitung city revenue continues to increase, while the results of the study by using the ratio of efficiency, budget spent by the government to collect revenue is still too big. It can be concluded that the performance of the Department of Revenue for the last 5 years is good.

Keywords : performance, local revenue

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah baik itu kabupaten maupun kota, untuk mengurus rumah tangganya sendiri baik dalam bidang pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam pengambilan keputusan serta mempunyai kewenangan luas dalam upaya mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu mengelola pemerintahan secara mandiri dengan memberdayakan sumber-sumber yang dimiliki dan penggunaannya harus berpihak pada kepentingan masyarakat banyak dan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan diberlakukannya Otonomi Daerah. Siahaan (2005 : 1) menyatakan bahwa Otonomi Daerah resmi diberlakukan di Indonesia pada tanggal 1 Januari 2001.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah maka pemerintah perlu mengelola sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Sumber-sumber PAD menurut Hariadi dkk (2010 : 13) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Alam Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Dalam mengelola PAD tersebut diperlukan kinerja yang baik dari pemerintah, agar PAD yang ada dapat tersalurkan dengan baik dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal ini SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang bertugas untuk mengelola PAD adalah Dinas Pendapatan Daerah. Penilaian kinerja merupakan penilaian kesuksesan pemerintah, sebagai suatu sarana pembelajaran untuk memperbaiki efektifitas dan potensi kinerja dimasa yang akan datang serta untuk mengevaluasi sejauh mana pemerintah menjalankan tugasnya dalam roda pemerintahan seperti pembangunan, pelayanan dan pertanggungjawaban keuangan.

Semua komponen Pendapatan Asli Daerah tersebut hendaknya dapat digali secara optimal sehingga pemerintah Daerah mampu membiayai kegiatan pembangunan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apalagi sumber-sumber penerimaan pendapatan di Kota Bitung sangat banyak, berupa 1). Pajak Daerah yang terdiri Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan, Pajak Air Tanah serta BPHTB, 2). Retribusi Daerah yang terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu, 3). Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan yang terdiri bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD, 4). Lain-lain PAD yang sah yang terdiri atas penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah dan lain sebagainya.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kinerja dari Dinas Pendapatan Daerah dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Pendapatan Daerah lain-lain yang sah.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Keuangan

Akuntansi adalah satu kegiatan jasa, yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan akan berguna dalam mengambil keputusan ekonomi-membuat pilihan-pilihan nalar diantara berbagai alternatif arah tindakan.

Entitas yaitu suatu organisasi, baik itu organisasi perusahaan maupun pemerintahan. Contoh organisasi pemerintahan adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akuntansi organisasi pemerintah disebut Akuntansi Pemerintahan, sedangkan untuk pemerintah daerah disebut Akuntansi Keuangan Daerah.

Akuntansi bukan hanya dipakai oleh perusahaan-perusahaan, pemerintah pun dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi juga menggunakan akuntansi sebagai alat dalam mengukur tingkat pencapaian dan kesuksesan pembangunan.

Lingkup Akuntansi Pemerintahan :

- a. Akuntansi Pemerintah Pusat
- b. Akuntansi Pemerintah Daerah yang terbagi atas akuntansi pemerintah provinsi dan akuntansi pemerintah kabupaten/kota.

Akuntansi Keuangan Daerah

Halim (2007 : 42) Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan sebagai bahan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi). Pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah (DPRD); Badan Pengawas Keuangan Investor, Kreditor dan Donatur, Analisis Ekonomi dan Pemerhati Pemda; rakyat ; Pemerintah Daerah lain; dan pemerintah pusat, yang seluruhnya berada dalam lingkungan Akuntansi Daerah.

Mahmudi (2011 : 177) yang merujuk pada Pengertian Keuangan Negara dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 menyatakan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Ruang lingkup keuangan Daerah meliputi :

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah;
- c. Penerimaan daerah;
- d. Pengeluaran daerah;
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/ atau kepentingan umum.

Landasan Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah :

- a. UUD 1945 Amandemen IV Bab VIII Pasal 23C
- b. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- c. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- d. UU No. 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
- e. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- f. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- g. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- h. Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- i. PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Kinerja Pemerintah Daerah

Mahsun (2006 : 25) menyatakan kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu.

Fahmi (2011 : 1) menyatakan kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit oriented dan nonprofit oriented yang dihasilkan selama satu periode waktu.

Manfaat Pengukuran Kinerja :

- a. Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja.
- b. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati.
- c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja.
- d. Memberikan penghargaan dan hukuman yang obyektif atas prestasi pelaksana yang telah diukur sesuai dengan system pengukuran kinerja yang telah disepakati.
- e. Menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi.
- f. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
- g. Membantu memahami proses kegiatan pemerintah.

- h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.
- i. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.

Fokus Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah

- a. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- b. Tugas Pokok dan Fungsi
- c. Struktur Organisasi dan Personalia
- d. Program kerja
- e. Anggaran

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan artinya mengelola, mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan public atau masyarakat banyak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan pendekatan kinerja yang berorientasi pada *output* dengan menggunakan konsep nilai uang (*value for money*) serta prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governant governance*). Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Halim dan Iqbal (2012 : 164) mengungkapkan arti penting dari anggaran daerah dapat dilihat dari aspek-aspek berikut ini :

- a) Anggaran merupakan alat bagi pemerintah daerah untuk mengarahkan dan menjamin kesinambungan pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- b) Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*), pilihan (*choice*), dan *trade offs*.

Struktur Anggaran Daerah (APBD)

- I. Pendapatan Daerah : semua penerimaan daerah dalam periode tahun tertentu yang menjadi hak daerah.
 - a) Pendapatan asli daerah
 - b) Dana Perimbangan
 - c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- II. Belanja daerah : semua pengeluaran dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.
 - a. Belanja pegawai
 - b. Belanja barang dan jasa
 - c. Belanja modal
 - d. Bunga
 - e. Subsidi
 - f. Hibah
 - g. Bantuan sosial
 - h. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan
 - i. Belanja tidak terduga
- III. Pembiayaan : transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
 - a) Penerimaan
 - b) Pengeluaran

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang potensial bagi daerah untuk membiayai semua pengeluaran pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah terdiri dari penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah itu sendiri yang pungutannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Unsur-unsur PAD menurut Halim (2007: 47) :

- a) Pajak Daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
- b) Retribusi Daerah. Retribusi kabupaten/kota terbagi atas dua 1). Retribusi yang ditetapkan sesuai kewenangan daerah masing-masing, 2) retribusi yang ditetapkan sesuai jasa atau pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah.
- c). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d). Lain-lain PAD yang sah. Meliputi hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, dan lain-lain.

Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Boseren (2008)	Analisis Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manokwari	Untuk mengetahui keefektifan kinerja Dinas Pendapatan Daerah Dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Analisis Deskriptif Kualitatif	Hasil analisis perkembangan target dan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah selama 6 tahun terakhir dari tahun 2000-2005 sebesar 167,16%-31,09%, dan 209,40%-409,99%. menunjukkan penerimaan pajak mengalami penurunan dan penerimaan retribusi mengalami peningkatan.	Peneliti sbelumnya melakukan penelitian terhadap factor yang sama yaitu analisis kinerja Dinas Pndapatan Daerah.	Metode penelitian yang digunakan peneliti sebelumnya adalah deskriptif, sedangkan peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan mengumpulkan dan mengolah data yang diperoleh. Objek penelitian sebelumnya adalah Dinas Pendapatan Daerah Monokwari, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan dan mengolah data-data yang ada baik itu data dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung maupun data yang diambil dari sumber lain. Penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari objek penelitian (Kuncoro, 2009:12).

Tempat dan Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan di kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara selama 1 bulan yaitu pada bulan Mei.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu melalui study kepustakaan dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta, melakukan wawancara dengan staf dari Dinas Pendapatan Daerah serta turun lapangan dengan mendatangi langsung kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung.

Jenis Data dan Sumber Data

Kuncoro (2009 : 145) mengungkapkan jenis data terbagi atas dua yaitu, data kuantitatif dan data kualitatif, keduanya dipakai dalam penelitian ini yaitu berupa gambaran umum mengenai sejarah Kota Bitung dan Laporan Target dan realisasi PAD. Sedangkan untuk sumber data terbagi atas dua yaitu data primer dan data sekunder.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu metode analisis dengan mengumpulkan dan mengolah data yang diperoleh, serta menggunakan analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja. (Mahmudi, 2011 : 171).

a) Rasio Efektifitas PAD.

Dihitung dengan cara membandingkan realisasi pendapatan dengan target penerimaan pendapatan yang dianggarkan.

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pendapatan}}{\text{Target penerimaan pendapatan}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas pendapatan menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan. Semakin besar nilai persentasenya berarti semakin baik kinerja pemerintah. Secara umum nilai efektifitas dapat dilihat sebagai berikut :

- Sangat efektif : > 100%
- Efektif : 100%
- Cukup efektif : 90%-99%
- Kurang efektif : 75%-89%
- Tidak efektif : <75%

b) Rasio Efisiensi PAD.

Dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi penerimaan pendapatan.

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{biaya pemerolehan pendapatan}}{\text{realisasi penerimaan pendapatan}} \times 100\%$$

Semakin kecil nilai rasio efisiensi maka semakin baik kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan pendapatan. Secara umum nilai rasio efisiensi pendapatan dapat dilihat sebagai berikut :

- Sangat efisien : <5%
- Efisien : 5%-10%
- Cukup Efisien : 11%-20%
- Kurang Efisien : 21%-30%
- Tidak efisien : >30%

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Kota Bitung

Kota Bitung berasal dari nama Pohon Witung yang banyak terdapat di pesisir pantai di Bitung, penduduk pertama yang menamai Bitung adalah Timani Bitung (timani adalah penjaga kebun/tanah yang dimiliki oleh pemerintah belanda pada saat itu, yang sekarang telah menjadi kebun/tanah milik pemerintah Indonesia) yaitu Dotu Nicodemus Sompotan dan istrinya Sabina Lontoh. Kota Bitung terletak di Provinsi Sulawesi Utara, dengan kepala daerahnya dipimpin oleh Walikota, periode 2010-2015 adalah Hanny Sondakh dan Wakil Max J. Lomban. Luas wilayah 313km^2 . Total Penduduk sebesar 214.932 jiwa. Kota Bitung terletak pada posisi geografis di antara $1023'23''-1035'39''\text{LU}$ dan $12501'43''-125018'13''\text{BT}$ dan luas wilayah daratan 304 km^2 .

Sebagian besar penduduk Kota Bitung berasal dari Minahasa dan Sangihe. Ada juga komunitas Tionghoa, serta pendatang yang berasal dari Pulau Jawa dan Provinsi Gorontalo, dimana sebagian besar dari mereka berprofesi sebagai pedagang. Agama yang dipeluk oleh penduduk kota Bitung adalah agama Kristen Protestan, Katholik, Konghucu, Budha dan Islam. Bahasa yang sering digunakan oleh masyarakat Kota Bitung adalah Bahasa asli Manado dan Sangihe juga sering digunakan oleh masyarakat suku Sangir yang ada di Kota Bitung.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung

Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung merupakan salah satu Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Kota Bitung yang melaksanakan tugas dibidang pengelolaan pendapatan daerah.

- I. Visi dari Dinas Pendapatan Daerah adalah "Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang Berkualitas dan Partisipatif." Berdasarkan visi tersebut, maka ditetapkan Misi : Meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- II. Optimalisasi pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang terukur, berkualitas dan berkeadilan.
- III. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur bidang pendapatan sesuai dengan standar pelayanan.

Tabel 2. Target PAD Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung Tahun 2008-2012

Rincian PAD	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Pajak Daerah	3.726.749.150	4.530.000.500	6.344.025.000	11.277.205.000	14.460.500.000
Retribusi Daerah	3.096.782.000	4.452.083.150	5.562.075.000	4.380.245.000	4.592.572.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Alam yg Dipisahkan	1.200.000.000	1.347.709.403	1.164.487.862	7.567.550.000	7.405.223.000
Lain-Lain PAD yang sah	4.763.045.125	7.126.724.637	6.826.338.725	83.196.245	3.994.744.269
Jumlah PAD	12.786.576.275	17.456.517.690	19.896.926.587	23.308.196.245	30.453.039.269

Sumber : Data PAD DIPENDA Kota Bitung

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dalam setiap tahunnya target PAD yang ada di kota Bitung terus meningkat selama 5 tahun terakhir.

Tabel 3. Realisasi PAD Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung Tahun 2008-2012

Rincian PAD	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Pajak Daerah	4.794.626.219	6.248.071.159	7.914.208.902	15.419.397.000	16.383.678.681
Retribusi Daerah	3.591.758.088	3.939.780.121	4.989.083.497	4.445.093.760	9.929.784.412
Hasil Peengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	915.266.042	1.347.709.403	1.164.487.862	5.429.689.843	2.348.938.421
Lain-Lain PAD yang sah	7.042.959.394	5.287.213.131	4.807.731.699	99.883.096	5.747.948.811
Jumlah PAD	16.344.609.743	16.822.773.814	18.875.511.960	25.394.063.699	34.410.350.325

Sumber : Data PAD DIPENDA Kota Bitung

Tabel di atas menunjukkan bahwa setiap tahunnya realisasi PAD di Kota Bitung mengalami peningkatan.

Tabel 4. Target dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2008-2012

Tahun	Anggaran	Realisasi
2008	5.100.000.200	5.200.100.100
2009	5.000.250.900	5.004.073.910
2010	6.004.650.150	6.066.638.245
2011	5.270.365.200	5.310.128.705
2012	7.850.133.538	7.571.609.290

Sumber : Data olahan PAD DIPENDA Kota Bitung

Tabel tersebut adalah anggaran belanja dari Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan atau mengelola Pendapatan Asli Daerah selama 5 Tahun terakhir.

Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan teknik analisis yaitu rasio efektifitas dan efisiensi, maka didapatlah hasil sebagai berikut :

Tabel 5. Kriteria Rasio Efektivitas PAD Tahun 2008-2012

Tahun	Persentase	Kriteria Efektivitas	Kategori
2008	127,8%	> 100% : Sangat Efektif	Sangat Efektif
2009	96,4%	100% : Efektif	Cukup Efektif
2010	94,8%	90%-99% : Cukup Efektif	Cukup Efektif
2011	108,9%	75%-89% : Kurang Efektif	Sangat Efektif
2012	112,9%	> 75% : Tidak Efektif	Sangat Efektif

Sumber : Data olahan PAD DIPENDA Kota Bitung

Hasil perhitungan rasio Efektivitas di atas dapat dilihat bahwa tahun 2008, persentase PAD Kota Bitung sebesar 127,8%, mengalami penurunan pada tahun 2009 sebesar 31,4%, dari tahun 2009 ke tahun 2010 turun lagi sebesar 1,6%, dan pada tahun 2010 ke 2011 terjadi peningkatan 14,1%, sedangkan tahun 2011 ke tahun 2012 terjadi peningkatan lagi sebesar 4%.

Tabel 6. Kriteria Efisiensi PAD Kota Bitung Tahun 2008-2012

Tahun	Persentase	Kriteria Efisiensi	Kategori
2008	31,8%	< 5% : Sangat Efisien	Tidak Efisien
2009	29,7%	5%-10% : Efisien	Kurang Efisien
2010	32,1%	11%-20% : Cukup Efisien	Tidak Efisien
2011	20,0%	21%-30% : Kurang Efisien	Cukup Efisien
2012	22,0%	> 30% : Tidak Efisien	Kurang Efisien

Sumber : Data Olahan PAD DIPENDA Kota Bitung

DIPENDA masih belum Efisien dalam mengeluarkan anggaran untuk mengelola PAD. Hal itu dikarenakan tahun 2008 efisiensi PAD sebesar 31,8%, tahun 2009 turun 2,1%, sedangkan tahun 2011 turun sebesar 12,1% hingga menjadi 20,0% dan tahun 2012 naik 2% menjadi 22,0%.

PENUTUP

Kesimpulan

Kinerja DIPENDA kota Bitung dalam mengelola pendapatan asli daerah (PAD) yang dihitung dengan membandingkan target dan realisasi PAD tahun 2008 sampai 2012 adalah sangat efektif, misalnya tahun 2012 sebesar 112,9% dari kriteria efektifitas >100% adalah sangat efektif. Kinerja DIPENDA kota Bitung dengan membandingkan antara anggaran dan realisasi belum efisien, karena banyaknya pengeluaran dalam mengelola PAD, misalnya tahun 2012, yaitu 22,0%, angka ini dianggap terlalu besar jika dibandingkan dengan kriteria efisiensi <5% adalah sangat efisien. Semakin kecil angka persentase efisiennya berarti semakin baik kinerja dari DIPENDA. Secara umum kinerja DIPENDA Kota Bitung yang diukur dari kinerja keuangan selama 5 tahun terakhir menggunakan Rasio Efektifitas adalah baik dan menggunakan Rasio Efisiensi, belum efisien.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung sebaiknya lebih mengoptimalkan, menggali seluruh potensi pendapatan yang ada di kota Bitung baik itu Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah mengingat begitu banyaknya yang bisa menjadi objek Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Bitung.
2. Kualitas kinerja dari Dinas Pendapatan Daerah dalam hal mengelola ataupun manajemen sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Guna pencapaian efisiensi kinerja, pemerintah sebaiknya mengurangi anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Boseren, Hana Selfiana. 2008. Analisis Kinerja Dinas Pendapatan Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Karya Ilmiah*. STIE MAH-EISA. Manokwari.
- Fahmi, Irfan. 2011. *Analisis Kinerja Keuangan*. Cetakan kesatu. Alfabeta CV. Bandung.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi ketiga. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim., Iqbal. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi ketiga. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Hariadi., Restianto., Bawono. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Cetakan pertama. Salemba empat. Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi ketiga. Erlangga. Jakarta.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi pertama. UII Press Yogyakarta. Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi pertama. BPFE Yogyakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.
- _____. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta.
- Siahaan, Marihot. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Cetakan ke-2. Raja Grafindo Persada. Jakarta.